Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 9, Number 11, 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



KINERJA PEMERINTAH DESA TUMARATAS DUA KECAMATAN LANGOWAN BARAT KABUPATEN MINAHASA

Agnesia I. L. Wurarah[1], Joyce J. Rares[2], Rully Mambo[3]
[123] Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Sam Ratulangi Manado

A R T I C L E I N F O

Article history:
Received Januari, 2026
Revised Januari, 2026
Accepted Januari, 2026
Available online Januari , 2026

agnesiawurarah27@gmail.com, joy.rares09@gmail.com, rullymambo@gmail.com

This is an open access article under the CC BY-SA license. Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Pendidikan Ganesha.

A B S T R A K

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis Kinerja Pemerintah Desa Tumaratas Dua Kecamatan Langowan Barat Kabupaten Minahasa dalam menjalankan fungsi pemerintahan, pelayanan publik, serta pembangunan Desa. Kinerja pemerintah desa menjadi elemen krusial dalam keberhasilan pelaksanaan otonomi desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Fokus penelitian ini diletakkan pada tiga dimensi utama kinerja, yaitu produktivitas, kualitas layanan dan responsivitas. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, data diperoleh dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan kinerja Pemerintah Desa Tumaratas Dua secara umum telah berjalan dengan cukup baik, namun masih memerlukan peningkatan di beberapa aspek. Dalam dimensi produktivitas, pemerintah desa berhasil melaksanakan program pembentukan Bumdes dan Kelompok tani. Namun tranparansi informasi anggaran masih menjadi tantangan. Dalam apek kualitas layanan, Pelayanan kepada masyakat dinilai sudah memadai, ditandai dengan keramahan dan kecepatan proses. Sementara itu, dalam dimensi responsivitas, pemerintah desa menunjukkan upaya proaktif dalam menanggapi kebutuhan mendesak masyarakat, terutama yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam musyawarah desa sudah tinggi, namun sosialisasi kebijakan perlu diintensifkan agar masyarakat memahami hak dan kewajiban mereka. Kesimpulannya, kinerja pemerintah desa perlu ditingkatkan melalui penguatan kapasitas sumber daya manusia, perbaikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran.

Kata Kunci: Kinerja Pemerintah Desa; Produktivitas; Kualitas Layanan; Responsivitas

A B S T R A C T

The objective of this research is to analyze the performance of the Tumaratas Dua Village Government, Langowan Barat District, Minahasa Regency, in carrying out the functions of governance, public service, and village development. The performance of the village government is a crucial element in the successful implementation of village autonomy and the improvement of community welfare. The focus of this study is placed on three main dimensions of performance: productivity, service quality, and responsiveness. This research uses a descriptive qualitative research method; data was obtained from observation, interviews, and documentation. The results of the study indicate that the performance of the Tumaratas Dua Village Government has generally been running quite well, but still requires improvement in several aspects. In the dimension of productivity, the village government succeeded in implementing programs for the establishment of Bumdes (Village-Owned Enterprises) and farmer groups. However, transparency in budget information remains a challenge. In the aspect of

*Corresponding author
E-mail addresses: deniswauran@gmail.com

service quality, services to the community are assessed as adequate, characterized by friendliness and speed of process. Meanwhile, in the dimension of responsiveness, the village government shows proactive efforts in responding to urgent community needs, especially those related to community necessities. Community participation in village meetings is already high, but policy socialization needs to be intensified so that the community understands their rights and obligations. In conclusion, the performance of the village government needs to be improved through strengthening the capacity of human resources, and enhancing the transparency and accountability of budget management.
***Keywords**: Village Government Performance; Productivity; Service Quality; Responsiveness.*

1. PENDAHULUAN

Pemerintahan desa memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan pembangunan dan pelayanan publik di tingkat lokal. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah desa diberikan kewenangan yang lebih luas dalam mengelola pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat. Pemberian kewenangan tersebut menuntut pemerintah desa untuk menunjukkan kinerja yang efektif, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Kinerja pemerintah desa menjadi indikator penting dalam menilai keberhasilan pelaksanaan otonomi desa. Dwiyanto (2011) menjelaskan bahwa kinerja pemerintahan tidak hanya diukur dari capaian program, tetapi juga dari kemampuan aparatur dalam memberikan pelayanan publik, menjawab kebutuhan masyarakat, serta mempertanggungjawabkan setiap kebijakan yang dijalankan. Dalam konteks pemerintahan desa, kinerja mencerminkan sejauh mana pemerintah desa mampu mengelola sumber daya, melaksanakan program pembangunan, serta memberdayakan masyarakat secara berkelanjutan.

Pemerintah desa memiliki tanggung jawab utama dalam menggerakkan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nugroho (2021) menegaskan bahwa desa bukan lagi sekadar pelaksana kebijakan dari pemerintah di atasnya, melainkan aktor utama dalam pembangunan lokal. Oleh karena itu, kapasitas aparatur desa, sistem kerja pemerintahan, serta kualitas pelayanan publik menjadi faktor penentu keberhasilan pembangunan desa.

Desa Tumaratas Dua Kecamatan Langowan Barat Kabupaten Minahasa merupakan salah satu desa yang memiliki potensi ekonomi cukup besar, khususnya pada sektor pertanian. Potensi tersebut seharusnya dapat dikelola secara optimal melalui peran aktif pemerintah desa. Namun, berdasarkan kondisi empiris yang ditemukan dalam penelitian, masih terdapat berbagai permasalahan dalam pelaksanaan pemerintahan desa, terutama terkait dengan efektivitas kinerja aparatur, koordinasi kelembagaan, serta partisipasi masyarakat dalam program pembangunan.

Permasalahan kinerja pemerintah desa terlihat dari belum optimalnya pengelolaan program pemberdayaan masyarakat, keterbatasan kapasitas aparatur dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan, serta masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam mendukung program desa. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan kebijakan pembangunan desa dengan realisasi di lapangan. Padahal, menurut Handoko (2020), keberhasilan pembangunan desa sangat dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah desa dalam mengelola program secara partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Kinerja pemerintah desa juga berkaitan erat dengan kualitas pelayanan publik. Pelayanan yang efektif, transparan, dan responsif menjadi tolok ukur utama dalam menilai keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan desa. Dwiyanto (2011) menegaskan bahwa kinerja pemerintahan dapat dianalisis melalui beberapa indikator utama, yaitu produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas. Kelima indikator tersebut menjadi dasar dalam menilai sejauh mana pemerintah desa mampu menjalankan fungsi pemerintahan secara optimal.

Dalam konteks Desa Tumaratas Dua, kinerja pemerintah desa menjadi aspek penting untuk dikaji karena desa ini memiliki potensi ekonomi yang cukup besar, tetapi masih menghadapi kendala dalam pengelolaan program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Kondisi ini menunjukkan perlunya evaluasi terhadap kinerja pemerintah desa guna mengetahui sejauh mana

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 9, Number 11 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



pelaksanaan tugas pemerintahan telah berjalan sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja Pemerintah Desa Tumaratas Dua Kecamatan Langowan Barat Kabupaten Minahasa dalam menjalankan fungsi pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat. Analisis dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pemerintahan yang meliputi produktivitas, kualitas pelayanan, responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran objektif mengenai kinerja pemerintah desa serta menjadi bahan evaluasi bagi peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa ke depan.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai kinerja Pemerintah Desa Tumaratas Dua Kecamatan Langowan Barat Kabupaten Minahasa dalam menjalankan fungsi pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat. Pendekatan kualitatif dianggap relevan karena mampu menggambarkan realitas sosial secara komprehensif berdasarkan kondisi empiris di lapangan.

Lokasi penelitian ditetapkan di Desa Tumaratas Dua Kecamatan Langowan Barat Kabupaten Minahasa. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa desa tersebut memiliki potensi ekonomi yang cukup besar serta telah melaksanakan berbagai program pemberdayaan masyarakat, namun masih menghadapi sejumlah permasalahan dalam pelaksanaan pemerintahan desa. Penelitian dilaksanakan dalam kurun waktu yang disesuaikan dengan kebutuhan pengumpulan data lapangan.

Informan penelitian ditentukan secara purposive, yaitu dipilih secara sengaja berdasarkan pertimbangan keterlibatan dan pengetahuan terhadap permasalahan yang diteliti. Informan terdiri atas aparatur pemerintah desa, tokoh masyarakat, serta pihak-pihak yang terlibat langsung dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat. Penentuan informan ini bertujuan untuk memperoleh data yang akurat, mendalam, dan relevan dengan fokus penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan untuk melihat secara langsung aktivitas pemerintahan desa, pola pelayanan kepada masyarakat, serta pelaksanaan program pembangunan. Wawancara dilakukan secara mendalam kepada informan guna memperoleh informasi terkait pelaksanaan tugas pemerintah desa, kendala yang dihadapi, serta persepsi masyarakat terhadap kinerja pemerintah desa. Dokumentasi digunakan untuk melengkapi data penelitian berupa dokumen resmi desa, laporan kegiatan, serta data pendukung lainnya yang relevan dengan penelitian.

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data yang diperoleh dari lapangan diseleksi dan diklasifikasikan sesuai dengan fokus penelitian, kemudian disajikan dalam bentuk uraian naratif untuk memudahkan pemahaman. Selanjutnya, penarikan kesimpulan dilakukan dengan mengkaji keterkaitan antar data sehingga diperoleh gambaran yang utuh mengenai kinerja pemerintah desa.

Untuk menjaga keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi, yaitu dengan membandingkan data hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Triangulasi dilakukan untuk memastikan bahwa data yang diperoleh benar-benar mencerminkan kondisi sebenarnya di lapangan. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan memiliki tingkat validitas dan kredibilitas yang tinggi.

*Corresponding author
E-mail addresses: agnesiawurarah27@gmail.com

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 9 No 11, 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kinerja Pemerintah Desa Tumaratas Dua dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Kinerja pemerintah desa merupakan gambaran kemampuan aparatur desa dalam melaksanakan tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat. Penilaian kinerja dalam penelitian ini mengacu pada indikator yang dikemukakan oleh Dwiyanto, yaitu produktivitas, kualitas pelayanan, responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas. Kelima indikator tersebut digunakan untuk melihat sejauh mana Pemerintah Desa Tumaratas Dua mampu menjalankan fungsi pemerintahan secara efektif.

Produktivitas Pemerintah Desa

Produktivitas menunjukkan kemampuan pemerintah desa dalam menghasilkan output kerja sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Tumaratas Dua telah melaksanakan berbagai program kerja desa, baik dalam bidang pelayanan administrasi, pembangunan fisik, maupun pemberdayaan masyarakat. Program-program tersebut dijalankan berdasarkan perencanaan desa yang disusun melalui musyawarah desa.

Hasil wawancara dengan aparat desa menunjukkan bahwa pelaksanaan program desa telah berjalan, namun belum seluruhnya optimal. Kepala desa menyampaikan bahwa keterbatasan sumber daya manusia dan kemampuan aparatur menjadi kendala utama dalam meningkatkan produktivitas kerja. Hal ini berdampak pada lambatnya penyelesaian beberapa kegiatan desa dan belum meratanya hasil pembangunan (Informan Kepala Desa).

Temuan ini sejalan dengan pendapat Dwiyanto (2011) yang menyatakan bahwa produktivitas aparatur pemerintah sangat dipengaruhi oleh kapasitas sumber daya manusia dan sistem kerja organisasi. Penelitian Nugroho (2021) juga menegaskan bahwa rendahnya produktivitas pemerintah desa umumnya disebabkan oleh lemahnya kompetensi aparatur serta kurangnya pembinaan teknis dari pemerintah di atasnya.

Wawancara dengan perangkat desa menguatkan temuan tersebut. Aparatur desa mengakui bahwa masih terdapat keterbatasan pemahaman terhadap tugas pokok dan fungsi, terutama dalam pengelolaan administrasi dan pelaksanaan program pembangunan (Informan Perangkat Desa). Kondisi ini menunjukkan bahwa produktivitas pemerintah desa masih perlu ditingkatkan melalui penguatan kapasitas aparatur dan pembagian kerja yang lebih jelas.

Kualitas Pelayanan Pemerintah Desa

Kualitas pelayanan menjadi indikator penting dalam menilai kinerja pemerintah desa karena berhubungan langsung dengan kepuasan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayanan administrasi di Desa Tumaratas Dua telah berjalan, namun kualitasnya belum sepenuhnya optimal. Masyarakat masih mengeluhkan lamanya proses pelayanan dan kurangnya kepastian waktu penyelesaian dokumen.

Warga desa menyampaikan bahwa pelayanan administrasi sering mengalami keterlambatan, terutama dalam pengurusan surat-menyurat. Meskipun aparat desa bersikap ramah, proses pelayanan belum sepenuhnya efektif (Informan Masyarakat).

Temuan ini sejalan dengan pendapat Dwiyanto (2011) yang menyatakan bahwa kualitas pelayanan publik ditentukan oleh kecepatan, ketepatan, dan kepastian prosedur. Penelitian Sedarmayanti (2018) juga menjelaskan bahwa rendahnya kualitas pelayanan publik sering disebabkan oleh lemahnya disiplin aparatur dan keterbatasan sarana pendukung pelayanan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan di Desa Tumaratas Dua masih perlu ditingkatkan, khususnya dalam hal ketepatan waktu pelayanan dan kejelasan prosedur. Meskipun

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 9, Number 11 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



demikian, sikap aparatur yang terbuka dan mau melayani masyarakat menjadi modal penting dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan ke depan.

Responsivitas Pemerintah Desa

Responsivitas menunjukkan kemampuan pemerintah desa dalam menanggapi kebutuhan, keluhan, dan aspirasi masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Tumaratas Dua telah berupaya menampung aspirasi masyarakat melalui musyawarah desa dan komunikasi langsung antara warga dan aparat desa.

Masyarakat menyampaikan bahwa aspirasi mereka biasanya disampaikan dalam forum musyawarah desa, terutama terkait pembangunan infrastruktur dan kebutuhan sosial. Pemerintah desa menindaklanjuti sebagian aspirasi tersebut sesuai dengan kemampuan anggaran yang tersedia (Informan Tokoh Masyarakat).

Namun demikian, tidak semua aspirasi masyarakat dapat segera direalisasikan. Keterbatasan anggaran dan skala prioritas pembangunan menjadi faktor utama yang memengaruhi tingkat responsivitas pemerintah desa. Hal ini sejalan dengan pendapat Nugroho (2021) yang menyatakan bahwa responsivitas pemerintah sangat dipengaruhi oleh kapasitas fiskal dan kemampuan perencanaan program.

Temuan ini menunjukkan bahwa pemerintah desa telah memiliki kemauan untuk merespons kebutuhan masyarakat, namun masih menghadapi kendala struktural yang membatasi ruang gerak dalam merealisasikan aspirasi tersebut.

Responsibilitas Pemerintah Desa

Responsibilitas berkaitan dengan kesesuaian pelaksanaan tugas pemerintah desa dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Tumaratas Dua telah melaksanakan tugas pemerintahan berdasarkan aturan yang ditetapkan, baik dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun pelaporan kegiatan desa.

Pelaksanaan kegiatan desa dilakukan melalui mekanisme musyawarah desa dan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Hal ini menunjukkan adanya upaya untuk menjalankan pemerintahan sesuai dengan prinsip tata kelola yang berlaku. Kepala desa menyampaikan bahwa seluruh kegiatan desa selalu mengacu pada peraturan dan petunjuk teknis dari pemerintah daerah (Informan Kepala Desa).

Temuan ini sejalan dengan pendapat Dwiyanto (2011) yang menyatakan bahwa responsibilitas pemerintah tercermin dari kepatuhan terhadap aturan dan norma yang berlaku. Namun demikian, penelitian ini juga menemukan bahwa masih terdapat keterbatasan pemahaman aparatur terhadap regulasi tertentu, terutama yang berkaitan dengan administrasi keuangan desa.

Akuntabilitas Pemerintah Desa

Akuntabilitas merupakan aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, khususnya dalam pengelolaan keuangan desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Tumaratas Dua telah menyusun laporan pertanggungjawaban penggunaan dana desa dan menyampaikannya kepada masyarakat melalui forum musyawarah desa serta papan informasi.

Masyarakat menyatakan bahwa pemerintah desa telah berupaya transparan dalam menyampaikan penggunaan dana desa, meskipun tidak semua masyarakat memahami isi laporan tersebut secara menyeluruh (Informan Masyarakat). Hal ini menunjukkan bahwa transparansi telah dilakukan, tetapi masih perlu ditingkatkan dalam hal sosialisasi dan pemahaman masyarakat.

*Corresponding author
E-mail addresses: agnesiawurarah27@gmail.com

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 9 No 11, 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



Temuan ini sejalan dengan pendapat Dwiyanto (2011) dan Sedarmayanti (2018) yang menyatakan bahwa akuntabilitas tidak hanya berkaitan dengan penyediaan laporan, tetapi juga dengan sejauh mana masyarakat dapat mengakses dan memahami informasi tersebut. Oleh karena itu, peningkatan akuntabilitas pemerintah desa perlu diiringi dengan peningkatan partisipasi dan literasi masyarakat.

4. SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai kinerja Pemerintah Desa Tumaratas Dua Kecamatan Langowan Barat Kabupaten Minahasa, dapat disimpulkan bahwa kinerja pemerintah desa secara umum telah berjalan, namun belum sepenuhnya optimal. Pemerintah desa telah melaksanakan fungsi pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kewenangan yang dimiliki, namun masih terdapat berbagai keterbatasan dalam pelaksanaannya. Kinerja pemerintah desa ditinjau dari aspek produktivitas menunjukkan bahwa program-program desa telah dilaksanakan, tetapi belum sepenuhnya mencapai hasil yang maksimal akibat keterbatasan sumber daya manusia dan kurangnya pemahaman aparatur terhadap tugas pokok dan fungsi.

Dari aspek kualitas pelayanan, pemerintah desa telah memberikan pelayanan kepada masyarakat, namun masih ditemukan kendala berupa keterlambatan pelayanan dan belum optimalnya sarana pendukung. Meskipun aparatur desa menunjukkan sikap yang cukup responsif dan terbuka terhadap masyarakat, kualitas pelayanan masih perlu ditingkatkan agar lebih efektif, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Responsivitas pemerintah desa dalam menanggapi aspirasi masyarakat telah berjalan melalui musyawarah desa, namun belum seluruh aspirasi dapat direalisasikan karena keterbatasan anggaran dan prioritas pembangunan yang harus disesuaikan dengan kebutuhan mendesak.

Dari sisi responsibilitas, pemerintah desa telah melaksanakan tugas pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dalam proses perencanaan dan pengawasan. Namun, masih ditemukan keterbatasan pemahaman aparatur terhadap regulasi tertentu, khususnya yang berkaitan dengan administrasi dan pengelolaan keuangan desa. Sementara itu, dari aspek akuntabilitas, pemerintah desa telah berupaya melaksanakan prinsip transparansi melalui penyampaian laporan pertanggungjawaban dan penyediaan informasi kepada masyarakat, meskipun tingkat pemahaman masyarakat terhadap laporan tersebut masih relatif rendah.

Berdasarkan temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kinerja Pemerintah Desa Tumaratas Dua telah berjalan cukup baik, namun masih memerlukan peningkatan, khususnya dalam hal peningkatan kapasitas aparatur desa, kualitas pelayanan publik, serta penguatan sistem pengelolaan pemerintahan desa yang lebih transparan dan akuntabel. Kinerja pemerintah desa perlu terus ditingkatkan agar mampu menjawab tuntutan masyarakat dan mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang baik.

Sehubungan dengan hal tersebut, disarankan agar pemerintah desa meningkatkan kompetensi aparatur melalui pelatihan dan pendampingan secara berkelanjutan, terutama dalam bidang administrasi pemerintahan dan pengelolaan keuangan desa. Pemerintah desa juga perlu meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan memperbaiki sistem pelayanan, memperjelas prosedur, serta meningkatkan kedisiplinan aparatur. Selain itu, partisipasi masyarakat perlu terus didorong agar masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga terlibat aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan desa. Pemerintah daerah diharapkan dapat memberikan pendampingan dan pengawasan yang lebih intensif guna mendukung peningkatan kinerja pemerintah desa secara berkelanjutan.

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 9, Number 11 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



5. DAFTAR PUSTAKA

Al Azis, M. V. N. (2022). Peran pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat petani di Desa Kertamukti Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa*, 7(1), 23–31.

Chotimah, C., Widodo, R., & Handayani, T. (2019). Efektivitas lembaga pemberdayaan masyarakat desa dalam pelaksanaan pembangunan Desa Bululawang. *Jurnal Civic Hukum*, 4(2), 103–112.

Fauzi, A., Handini, S., & dkk. (2020). *Manajemen kinerja*. Surabaya: Airlangga University Press.

Handini, S., Sukesi, & dkk. (2019). *Strategi pemberdayaan masyarakat*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka.

Handono, Y., Setiyo, B., & dkk. (2020). *Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat pertanian*. Yogyakarta: Deepublish.

Hikmat, H. (2009). *Strategi pemberdayaan masyarakat*. Bandung: Humaniora Utama Press.

Huseno, T. (2021). *Kinerja organisasi*. Malang: Media Nusa Creative.

Mardikanto, T. (2012). *Pemberdayaan masyarakat*. Bandung: Alfabeta.

Moleong, L. J. (2007). *Metode penelitian kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Nugroho, R., dkk. (2021). *Administrasi pemerintahan desa*. Jakarta: Elex Media Komputindo.

Nugroho, R., dkk. (2021). *Kepemimpinan pemerintah desa*. Jakarta: Elex Media Komputindo.

Oroh, G. S. (2014). Peranan pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat di bidang pertanian di Desa Tumaratas Kecamatan Langowan Barat Kabupaten Minahasa. *Politico: Jurnal Ilmu Politik*, 3(2).

Raharjo, M. M. (2021). *Tata kelola pemerintahan desa*. Jakarta: Bumi Aksara.

Raintung, A., Sambiran, S., & Sumampow, I. (2021). Peran pemerintah desa dalam pemberdayaan kelompok tani di Desa Mobuya Kecamatan Passi Timur Kabupaten Bolaang Mongondow. *Governance*, 1(2).

Resdiana, E., & Puspaningrum, I. I. (2020). Efektivitas dana desa dalam mendukung pemberdayaan masyarakat di Desa Marengan Daya Kabupaten Sumenep. *Public Corner*, 15(1), 48–60.

Rismawati, R., dkk. (2018). *Evaluasi kinerja*. Makassar: Celebes Media Perkasa.

Satar, A. L., & Al Fariqi, B. (2021). Efektivitas BUMDes dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat desa. *Jurnal Paradigma Madani*, 8(2), 15–21.

Suryani, N. K. (2020). *Kinerja sumber daya manusia*. Denpasar: Nilacakra.

Syaifudin, M. Y., & Ma'ruf, M. F. (2022). Peran pemerintah desa dalam pengembangan dan pemberdayaan masyarakat melalui desa wisata (Studi di Desa Jurug Kabupaten Ponorogo). *Publika*, 365–380.

*Corresponding author
E-mail addresses: agnesiawurarah27@gmail.com



Torau, S. (2019). Analisis kinerja pemerintah desa dalam pembangunan masyarakat di Desa Bontomanai Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar. *Jurnal Ilmiah Pranata Edu*, 1(2), 87–95.

Usman, S. (2009). *Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Welan, V. P. R., Kawung, G. M., & Tumangkeng, S. Y. (2019). Peran dana desa dalam memberdayakan ekonomi masyarakat Desa Ranowangko Kecamatan Tombariri. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 19(4).